UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Negotiating Human Rights, Religion, and Local Governance: An Anthropology of Ethics Study in Jombang, East Java
Wildan Ulumul Fahmi, Zainal Abidin Bagir, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Abstract

This study aims to understand the practice of human rights at the local level, the santri city of Jombang, East Java, as practiced by various human rights actors. It departs from the observation of the persistence gap between the dominant narratives representing the human rights governance in the region of Jombang and the practical realities on the ground. Based on a three-month fieldwork, this study selected two human rights cases (religious freedom and gender-based violence) to understand the general human rights governance in Jombang. The anthropology of ethics is adopted as the main framework for examining how human rights norms are understood, negotiated, and made relevant by various human rights actors in Jombang. The results show that, in both cases, the human rights governance was the result of the process of moral-ethical assemblages, which involves various actors negotiating the seemingly silent consensus on what forms of human rights governance can be achieved. In addition, with different attitudes towards human rights, the actors have vernacularized human rights based on their respective ethical commitments and the contexts they face on the ground. From the comparison between the two cases, the results show that the legal certainty and government support are decisive factors in the human rights governance on the ground. The difference is that while the gender-based violence governance has been very progressive, the religious freedom governance has been worrying in practice. For the former, the collective consciousness or hybrid moral ideologies towards GBV issues together with the legal certainty has made GBV governance conducive. For the latter, the fragmented and pragmatic ethical commitments of most human rights actors with the absence of legal certainty, has made the minority's positions very vulnerable.

Keywords: Negotiation; Human Rights Practice; Religion; Anthropology of Ethics; Local Governance.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Negotiating Human Rights, Religion, and Local Governance: An Anthropology of Ethics Study in Jombang, East Java
Wildan Ulumul Fahmi, Zainal Abidin Bagir, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Intisari

Studi ini bertujuan untuk memahami praktik hak asasi manusia di tingkat lokal, kota santri Jombang, Jawa Timur, sebagaimana dipraktikkan oleh beragam aktor hak asasi manusia. Studi ini berangkat dari pengamatan terhadap kesenjangan persistensi antara narasi dominan yang merepresentasikan tata kelola hak asasi manusia di Jombang dan realitas praktis yang ada di lapangan. Berdasarkan kerja lapangan (*fieldwork*) selama tiga bulan, studi ini memilih dua kasus hak asasi manusia (kebebasan beragama dan kekerasan berbasis gender) untuk memahami tata kelola hak asasi manusia secara umum di Jombang. Antropologi etika diadopsi sebagai kerangka teoritis utama untuk menelaah bagaimana norma hak asasi manusia dipahami, dinegosiasikan, dan dibuat relevan oleh beragam aktor hak asasi manusia di Jombang. Temuan menunjukkan bahwa, dalam kedua kasus, tata kelola hak asasi manusia merupakan hasil dari proses pertemuan moral-etis (*moral-ethical assemblage*), yang melibatkan beragam aktor yang bernegosiasi dengan konsensus yang tersirat tentang bentuk tata kelola hak asasi manusia yang dapat dicapai. Selain itu, dengan sikap yang berbeda terhadap hak asasi manusia, para aktor telah melakukan proses vernakularisasi hak asasi manusia berdasarkan komitmen etis masing-masing dan konteks yang mereka hadapi di lapangan. Dari perbandingan kedua kasus, temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum dan dukungan pemerintah merupakan faktor penentu dalam tata kelola hak asasi manusia dalam praktik di lapangan. Perbedaan yang menonjol adalah meskipun tata kelola kekerasan berbasis gender (KBG) sangat progresif, tata kelola kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dalam praktiknya sangat mengkhawatirkan. Untuk yang pertama, kesadaran kolektif atau ideologi moral hibrida terhadap isu KBG bersama dengan kepastian hukum telah membuat tata kelola KBG menjadi kondusif. Untuk yang terakhir (KBB), komitmen etis yang terfragmentasi dan pragmatis dari sebagian besar aktor hak asasi manusia tanpa kepastian hukum, telah membuat posisi minoritas sangat rentan.

Kata Kunci: Negosiasi; Praktik Hak Asasi Manusia; Agama; Antropologi Etika; Tata Kelola Lokal.